

Model Pengembangan BUMDES (Bada Usaha Milik Desa) Berbasis Teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Geraldo Syaloom Rumbino¹, Gilang Kurniawan Siregar², I Putu Handika Pradnyana³,
Fernandes Simangunsong⁴

¹²³⁴ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Desa
No.KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 45363

* Correspondence: kisankiel@yahoo.co.id

Citation:

Syaloom Rumbino, Geraldo, Kurniawan Siregar, Gilang, Handika Pradnyana, I Putu, Simangunsong, Fernandes. (2021). Model Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) berbasis Teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 14 - 36. doi: Prefix [10.32669](https://doi.org/10.32669)

Editor: Yusuf Adam Hilman

Received: 20 Juli 2021

Accepted: 20 Agustus 2021

Published: 30 Oktober 2021

Publisher's Note: Indonesian Journal Publisher ID - Publishing, stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) berbasis teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun konsep yang dipakai sebagai rujukan dan analisis adalah konsep Simangunsong dalam buku Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Seperti yang kita ketahui kita berada di era digital dimana segala hal yang dilakukan dan terjadi tidak terlepas dari adanya peran kemajuan teknologi yang ada saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di era ini bagaikan pedang bermata 2 (dua) dimana disatu sisi dapat membantu dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia seperti promosi tempat wisata melalui media sosial yang berupa badan usaha milik Desa yang bergerak melalui bidang pariwisata sehingga menarik jumlah wisatawan lebih banyak namun disisi lain juga menjadi ancaman dimana semakin maraknya kasus penipuan berbasis digital dan dampak negatif lainnya yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil mengatasi persoalan tersebut dengan mengoptimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat pesatnya kemajuan teknologi saat ini.

Kata kunci: BUMDES; Teknologi; Desa;

Abstract: This research aims to find out the development of technology-based BUMDES (Village Owned Enterprises) in Garut Regency of West Java Province by referring to Government Regulation No. 43 of 2014 on Regulation of Implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages. The concept used as a reference and analysis is the concept of Simangunsong in the book Community-Based Village Development Planning. The method used in this study is evaluation, which is to find out how far the implementation of a plan or how far the goal has been achieved. As we know we are in a digital era where everything that is done and happens is inseparable from the role of technological advances that exist today. The rapid advancement of technology that occurred in this era is like a 2-eyed sword (two) where

on the one hand can help and bring benefits to human life such as the promotion of tourist attractions through social media in the form of village-owned enterprises that move through the field of tourism so as to attract more tourists but on the other hand also become a threat where the increasing number of cases of digital-based fraud and other negative impacts caused by technological advances. now. Therefore, steps that can be taken to overcome these problems by optimizing positive impacts and minimizing the negative impact caused by the rapid advancement of technology today.

Keywords: BUMDES; Technology-Based; Village;

1. Pembahasan

Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota); dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota) (Simangunsong, 2021). In 2014, a new policy specified to manage village, Law No. 6 2014 on Village, was enacted. This law became the turning point for village management in Indonesia. The significance of village management in this law places village in accordance to constitution, referring to article 18B clause (2) and article 18 clause (7).

Pada tahun 2014, kebijakan baru yang ditetapkan untuk mengelola Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diundangkan. Undang-undang ini menjadi titik balik pengelolaan Desa di Indonesia. Arti penting pengelolaan Desa dalam undang-undang ini menempatkan Desa sesuai konstitusi, mengacu pada pasal 18B ayat (2) dan pasal 18 ayat (7) (Simangunsong F. W., 2017). UU (undang-undang) Desa ini telah memberikan harapan bagi terwujudnya Desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan sendiri, oleh karena itu hal ini harus dijadikan sebagai batu loncatan dalam meningkatkan perekonomian Desa melalui pengembangan BUMDES berbasis teknologi.

Desa memang menjadi modal dasar awal dari pembangunan Indonesia. Maka dari itu pemerintah terus mengupayakan untuk mennggenjot ekonomi Desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tujuannya terdapat dalam PermenDesa PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) dan Transmigrasi No. 4/2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik Desa adalah meningkatkan perekonomian Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa. Pada Tahun 2018, di Kabupaten Garut, terdapat 42 Kecamatan dengan 421 Desa dan 21 Kelurahan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1 Data Jumlah Dari Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Kecamatan/ Subdistrict	Desa/Village	Kelurahan/Village
Cisewu	9	
Caringin	6	
Talegong	7	
Bungbulang	13	
Mekarmukti	5	
Pamulihan	5	
Pakenjeng	13	
Cikelet	11	
Pameungpeuk	8	
Cibalong	11	
Cisompet	11	
Peundeuy	6	
Singajaya	9	
Cihurip	4	
Cikajang	12	
Banjarwangi	11	
Cilawu	18	
Bayongbong	18	

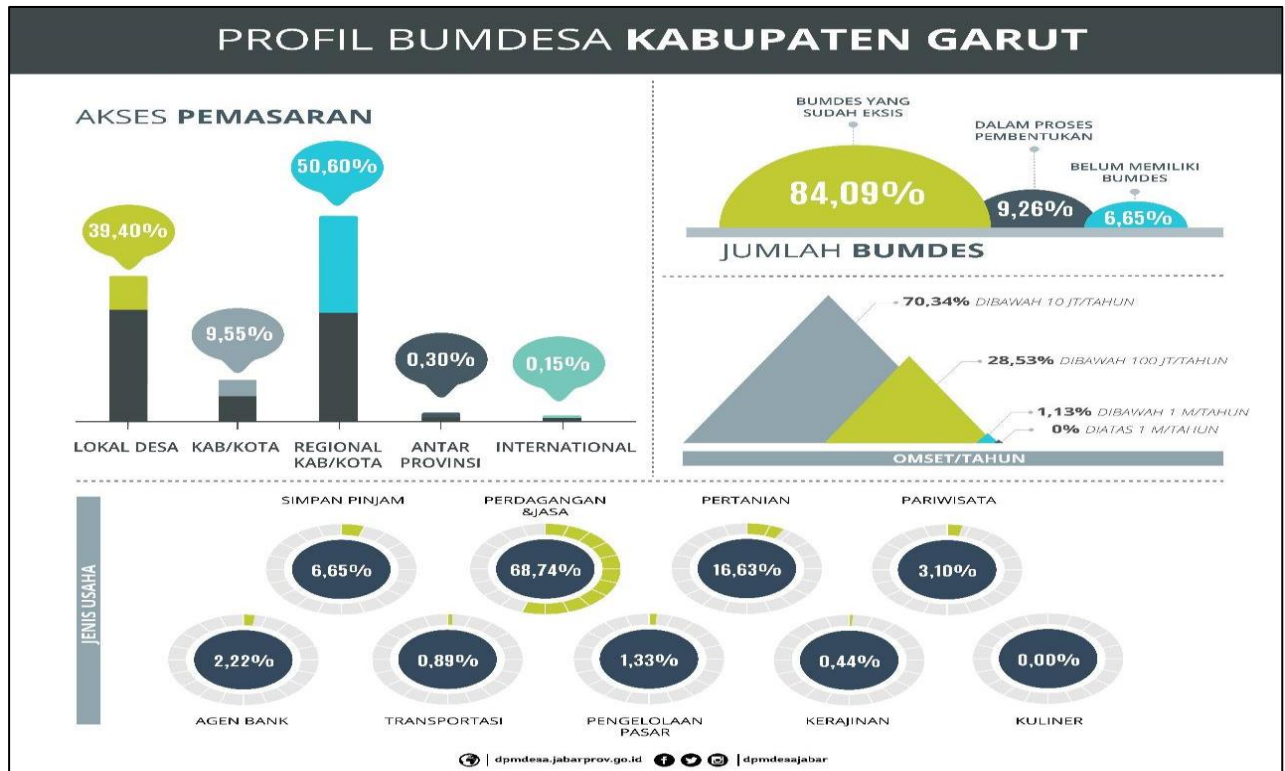
Cigedug	5	
Cisurupan	17	
Sukaesmi	7	
Samarang	13	
Pasirwangi	12	
Tarogong Kidul	7	5
Tarogong Kaler	12	1
Garut Kota		11
Karangpawitan	16	4
Wanaraja	9	
Sucinaraja	7	
Pangatikan	8	
Sukawening	11	
Karantengah	4	
Banyuresmi	15	
Leles	12	
Leuwigoong	8	
Cibatu	11	
Kersamanah	6	
Cibiuk	5	
Kadungora	14	
Blubur Limbangan	14	
Selaawi	7	
Malangbong	24	
Garut	421	21

Sumber: (Statistik, 2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat jika di Kabupaten Garut terdapat lebih banyak Desa dibandingkan dengan kelurahan oleh karena itu keberadaan Desa sangat berpengaruh besar bagi Kabupaten Garut, sehingga optimalisasi sarana dan pra sarana yang ada di Desa guna menyukkseskan pengembangan BUMDES di tiap-tiap Desa yang ada sehingga perekonomian di Desa dapat meningkat. Adapun Desa yang sudah memiliki

BUMDES maupun masih berkembang ataupun belum memiliki BUMDES, berikut merupakan profil BUMDES Kabupaten Garut.

Gambar 1 Profil BUMDES Kabupaten Garut



Sumber: (Barat, 2019)

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui secara rinci seputar data BUMDES dimana terdapat akses pemasaran yang frekuensinya terbesar berupa pemasaran regional (kab/kota) dan yang terendah di cakupan internasional hal ini menunjukkan bahwa pemasaran dan Teknik promosi kita yang bertaraf lokal sehingga belum dapat mencapai taraf internasional dengan maksimal. Keberadaan BUMDES di Kabupaten Garut yang sudah eksis mencapai presentase sebanyak 84,09%, yang masih dalam proses pembentukan sebesar 9,26% dan Desa yang belum memiliki BUMDES

sebesar 6,65%. Sebagian besar jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDES di garut adalah di bidang perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, simpan pinjam dan pengelolaan pasar. Rencana kerjasama usaha diantara Desa satu dengan Desa lain dan/ataupun dengan investor, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum dari warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dikembangkan oleh pihak pemerintah melalui partisipasi masyarakat. Berselaras pada kepemilikan bersama (Pemerintah Desa dan Masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, Pendapatan Asli Desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll). Salah satu strategi yang dapat mengembangkan BUMDES adalah melalui pemanfaatan teknologi yang mana sangat mendorong percepatan usaha dan membuka peluang pasar yang lebih luas dari biasanya. BUMDES di bidang pariwisata bisa mengoptimalkan dalam menyediakan sarana dan pra sarana sehingga menyajikan tempat yang aman dan nyaman. Adapun BUMDES yang sudah mulai menunjukkan hasilnya atau sudah terbilang cukup bagus seperti BUMDES Selawi yang bergerak di sektor kerajinan tangan bambu. Kehadiran BUMDES ini mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ati Chiu adalah panggilan akrab dari Ratna di komunitas bambu berharap, produk kerajinan bambu yang dihasilkan, terus berkembang seiring banyaknya akses

informasi yang diperoleh. “Kami pun mengembangkan pembibitan dengan lahan yang cukup luas” kata dia. Direktur Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan PerDesaan atau disebut Dirjen PKP Kemendes PDPT Harlima Sulistyorini, mengakui bahwa bangga dengan capaian dan progres BUMDES di kota dodol saat ini (Supriadin, 2018).

Meskipun belum seluruhnya didapatkan berkembang, namun setidaknya dalam pameran BUMDES yang diinisiasi media nasional itu, lembaganya menilai besarnya potensi yang telah ditampilkan BUMDES. Dengan upaya itu, dapat menjadi acuan dari pemerintahan untuk pengembangan kedepan (Supriadin, 2018). Namun tetap saja ada BUMDES yang mengalami masalah baik dari produk yang dikembangkan maupun dari masalah-masalah lainnya. Seperti BUMDES di Kecamatan Karangpawitan, dimana beras yang harusnya diadakan berkualitas bagus dan bercap bulog tapi tidak sesuai dengan apa yang didapat. “Jadi kasusnya itu terkait Labelisasi dan kualitas beras. Seharusnya di karung berasnya ada label Bulog, ini tidak ada, capnya pun asal-asalan, kemudian untuk berasnya juga harus berkualitas bagus (premium), bukan malah beras jelek dan tak layak dikonsumsi yang disalurkan. Kalau tak percaya tanya saja ke warga-warga Desa penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai),”. BUMDES Kecamatan Karangpawitan yang seharusnya bisa menjadi tumpuan warga penerima BPNT dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok yang berkualitas, ternyata malah sebaliknya. Selain berasnya jelek, bahan pokok seperti Telur, Daging Ayam, dan Buah-buahannya pun sama, alhasil hal ini telah membuat warga penerima

BPNT kecewa bukan kepalang. “Sudah pasti warga kecewa karena hampir semua bahan pokok tersebut berkualitas jelek, apalagi beratnya pun banyak yang kurang,” ungkapnya. BUMDESma ini disinyalir telah menjadi lahan bancakan bagi sejumlah pihak yang berkepentingan yang sengaja “bermain” didalamnya, karena logikanya kalau BUMDESnya dijalankan secara normatif demi kepentingan warga, maka pastinya bahan kebutuhan pokok yang sampai ke tangan warga penerima BPNT, kualitas dan beratnya pun dijamin bagus (Redaksi, 2019). Untuk melaksanakan BUMDES ini pasti ada anggaran yang dikeluarkan dari Desa, maka dari itu diperlukan untuk mengetahui APBD di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2 APBD Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat



Sumber: (Garut, 2020)

Dari data diatas terlihat bahwa anggaran belanja Kabupaten Garut pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan sehingga terjadi defisit, diperlukan kebijakan

defisit anggaran dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan langkah lain dalam kebijakan ekonomi diantaranya mengoptimalkan BUMDES sehingga menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Selanjutnya bagaimana pemerintahan Desa mengelola anggaran tersebut untuk memajukan BUMDESnya. Di zaman yang modern ini teknologi sangat diperlukan dalam berbagai bidang maka dari itu pelaksanaan BUMDES yang efektif perlu berbasis Teknologi. Dengan anggaran tersebut maka BUMDES yang berbasis teknologi dapat tercapai.

Aspek lain juga mempengaruhi kinerja Desa dalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya (TUPOKSI) adalah dukungan sumber daya aparatur (baik jumlah maupun kualitas). Tentunya untuk mengetahui lebih rinci seputar pelaksanaan birokrasi di Desa-Desa yang berada di Kabupaten Garut dan menentukan kebijakan serta langkah kedepannya maka kita harus mengetahui persebaran ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan variabel-variabel yang ada baik tingkat pendidikannya, umur, jenis kelamin, dan sebagainya.

Tabel 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2017

Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>		Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	Badan Kepegawaian Dan Diklat	37	27	64
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	25	5	30
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	7	29
4	Badan Pendapatan Daerah	64	28	92
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	54	33	87
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52	25	77
7	BP. RSUD DR SLAMET	245	304	549
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	29	22	51
9	Dinas Kesehatan	521	943	1.464

10	Dinas Ketahanan Pangan	22	21	43
11	Dinas Kounikasi Dan Informatika	44	11	55
12	DINAS KOPERASIDAN UKM	30	14	44
13	Dinas Lingkungan Hidup	260	32	292
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	57	13	70
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	282	47	329
16	Dinas Pemadam Kebakaran	46	12	58
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	34	21	55
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	44	8	52
19	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu	32	13	45
20	Dinas Pendidikan	4.559	5.864	10.423
21	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	94	81	175
22	Dinas Perhubungan	170	8	178
23	Dinas Perikanan Dan Peternakan	81	35	116
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral	152	39	191
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	24	25	49
26	Dinas Pertanian	173	85	258
27	Dinas Perumahan Dan Permukiman	58	17	75
28	Dinas Sosial	16	18	34
29	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	43	15	58
30	Inspektorat Daerah	59	29	88
31	Kecamatan	701	157	858
32	Satpol PP	52	3	55
33	Sekretariat Daerah	143	70	213
34	Sekretariat DPRD	39	16	55
Jumlah		8.264	8.048	16.312

Sumber: (Garut B. K., 2017)

Dari persebaran jumlah ASN di atas dapat dilihat bahwa jumlah ASN antara pria dan wanita hampir memiliki jumlah yang seimbang dan persebarannya ada yang SKPDnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah) didominasi oleh Pria ada juga yang didominasi Wanita dan ada yang seimbang jumlahnya hal ini menunjukkan bahwa kuota dan keperluan tiap-tiap instansi itu berbeda sehingga diperlukan penyesuaian dalam jumlah aparatnya. Hal-hal lain yang juga sangat perlu di perhatikan

adalah latar belakang pendidikannya seperti yang akan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah ASN di Lingkungan Pemda Garut Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	176
SLTP	257
SLTA	2.341
D1	54
D2	456
D3	821
D4	214
S1	10.401
S2	1.577
S3	15
Jumlah	16312

Sumber: (Garut B. K., BPS, 2017)

Dari data diatas diketahui bahwa Sebagian besar ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja dibawah PEMDA (Pemerintahan Daerah) Kabupaten Garut didominasi oleh ASN yang berlatar belakang Pendidikan S1 yang berjumlah 10.401 dan kemudian disusul oleh lulusan SLTA yang berjumlah 2341 kemudian ASN paling sedikit berasal dari latar belakang Pendidikan S3 sebanyak 15 orang. Generasi milenial seharusnya diberikan ruang untuk menyalurkan ide- ide kreatifnya. Mereka pun harsunya turut dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan eksekutor di lapangan. Hal ini yang tentunya dimaksudkan untuk memupuk rasa percaya diri pada potensi di tempat tinggalnya, menyiapkan calon-calon pemimpin Desa, dan secara tidak langsung menciptakan program-program Desa wisata yang sedang populer di kalangan anak muda atau generasi milenial. Dengan begitu, peran generasi muda sangat penting dalam mewujudkan cita-cita Desa.

2. Metode

Paper ini merupakan hasil yang diperoleh melalui analisis dan penelitian secara mendalam melalui beberapa pendekatan dan hasil pengumpulan data yang sudah tersedia, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pengembangan BUMDES yang berada di Kabupaten Garut. Melalui hasil penelitian dan pendekatan yang dilakukan dapat diketahui secara objektif tingkat keberhasilan dari Program BUMDES, partisipasi masyarakat, dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Metode yang digunakan ialah metode evaluasi dimana untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu tujuan. Menurut (Simangunsong, 2016) "Data penelitian bersifat deskriptif yang artinya data data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi bersifat elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Simangunsong, 2016).

Pengolahan data yang telah didapat akan dilakukan dengan pendekatan evaluasi supaya didapatkan bagaimana pengembangan dari BUMDES yang berbasis teknologi ini. Dilihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi seperti potensi dan karakteristik dari daerah tersebut sehingga evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Dengan demikian, hasil dari penelitian evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, maupun hasil dari suatu proyek, kebijakan, dan program (Hayati, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan Teknik Purposive Sampling yaitu, teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampelnya. Dalam pengkajian ini instrumen pengkajian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun dalam perkembangannya akan disusun instrumen peneliti yang diharapkan dapat digunakan untuk menjangkau data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data yang diperoleh serta hasil observasi (Simangunsong F. , 2016).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun paper ini:

- a). Daftar isian, berupa daftar pernyataan tentang objek analisis potensi Desa di Kabupaten Garut,
- b).Dokumentasi, mengumpulkan data-data dari mempelajari, menelaah dan menganalisa literatur, dokumen, peraturan serta referensi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang dikaji.

Penggunaan teknik dalam pengkajian ini adalah:

- a) Proses Tahap Pertama

Pengolahan dimulai dengan adanya menelaah sumber data yang didapat dari daftar isian dan dokumentasi sehingga didapatkan data-data yang memang diperlukan dan memisahkan dari data yang tidak diperlukan.

b). Klarifikasi Data

Mengelompokan data pada kategorinya masing-masing serta dilakukannya perbandingan data dari daftar isian dengan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid.

3. Data dan Pembahasan

Kabupaten Garut memiliki 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dan 21 (dua puluh satu) Kelurahan. Sekitar 84,09% Desa memiliki BUMDES yang eksis, 9,26% Desa yang BUMDESnya masih dalam bentuk pemrosesan dan 6,65% Desa belum memiliki BUMDES. The right strategy in development achieves independence through BUMDES program. Some alternatives exist to realize an independent village, among others: Realized in Law No. 6 of 2014 on Villages. First, mapping the potential of villages and market networks to be managed as a source of village economy and popular economy. Second, the application of direct guidance or assistance for the acceleration of development in the field of socio-cultural aspects, strengthening village government capacity, and restructuring village administration. Third, build synergy between village development planning and regional and national planning. Fourth, realizing a modern village government organization based on the culture of village. If the development strategy is successful, it will affect the progress of the sector in it. To see how successful the development is, a benchmark is needed for the indicators. Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration No. 2 of 2016 on Village Development Index outlines the Village Building Index (IDM)

(Village Building Index) to realize independent Villages. A village can be said to be independent if it has 3 indices, namely social resilience, economic resilience, and ecological resilience. Each of these indices has its own dimensions and indicators.

Adapun strategi yang tepat dalam pembangunan mencapai kemandirian melalui program BUMDES. Beberapa alternatif yang ada untuk menempuh mewujudkan Desa mandiri, antara lain: Diwujudkan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertama, pemetaan potensi Desa dan jaringan pasar untuk dikelola sebagai sumber ekonomi Desa dan ekonomi kerakyatan. Kedua, penerapan bimbingan atau pendampingan langsung untuk percepatan pembangunan di bidang sosial budaya aspek, penguatan kapasitas pemerintahan Desa, dan restrukturisasi administrasi Desa. Ketiga, membangun sinergi antara perencanaan pembangunan pedesaan dan perencanaan daerah dan nasional. Keempat, mewujudkan pemerintahan Desa yang modern organisasi berbasis budaya pedesaan. Jika strategi pembangunan berhasil, maka akan berpengaruh kemajuan sektor di dalamnya. Untuk melihat seberapa sukses pembangunan tersebut, diperlukan suatu tolak ukur untuk indikator-indikator. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Pembangunan Desa menguraikan Indeks Desa Membangun (IDM) (Bangunan Indeks Desa) untuk mewujudkan Desa mandiri. Sebuah Desa bisa menjadi dikatakan mandiri apabila memiliki 3 indeks, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan

ekologi. Masing-masing indeks ini memiliki dimensi dan indikatornya sendiri (Simangunsong F. H., 2021).

BUMDES yang berbasis teknologi sudah sepatutnya dikembangkan di zaman modern ini, dengan pesatnya teknologi yang ada bisa menjadi lonjakan untuk meningkatkan BUMDES di segala bidang. Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut TIK, informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan sangat cepat, tepat dan akurat atau efisien, mampu mengurangi kesalahan yang dilakukan manusia atau sering disebut juga *reduce human error*, dapat diambil contoh kemunculan aplikasi-aplikasi perjalanan berbasis Internet Tourismn Information yang bergabung dengan E-commerce seperti berikut: Traveloka, Alibaba.com, Torifago, sebagai program piranti lunak Transport-Acomodation-Information Sistem. Dengan menggunakan software yang disebutkan tersebut informasi mengenai dari harga tiket, harga kamar hotel atau penginapan, ketersediaan akomodasi, kepastian pemesanan, informasi wisatawan yang akan datang, kemudahan pemesanan hotel maupun tiket transportasi di situasi kapanpun dan di manapun dapat terpenuhi. Kemudahan tersebut akan membuat wisatawan merasa sangat senang sehingga mengakibatkan jumlah pergerakan dan kedatangan wisatawan terus meningkat.

Perkembangan dari TIK juga sangat membantu dalam membuka informasi atau memperkenalkan destinasi-destinasi baik yang sudah terkenal ataupun masih sangat baru terhadap calon atau wisatawan yang telah tiba, memperkenalkan keunikan dari kebudayaan dan kearifan

lokal masyarakat di sekitar destinasi. Pergerakan informasi yang sangat luwes juga berdampak pada menyeluruhnya pergerakan wisatawan. Tak kalah pentingnya, inovasi-inovasi dalam membuat paket wisata menjadi sangat penting dalam mengelola Desa wisata. Hal ini ditujukan adalah untuk mamaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal agar bisa memiliki daya beli bagi calon wisatawan. Di sinilah peran BUMDES sangat dibutuhkan untuk ikut andil dalam mengembangkan potensi Desa.

Salah satu BUMDES sukses yang bertemakan wisata ada di Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan nama BUMDES As-Syifa yang terletak sekitar 17 (tujuh belas) kilometer arah utara pusat Kabupaten Garut. Kawasan wisata tersebut diwujudkan pada areal sekitar empat hektar melalui Tim Pelaksana Pembangunan Desa dengan menyerap anggaran Desa sedikitnya Rp 1 miliar dalam tiga tahun anggaran, ungkap Dadang Sutanto (Redaktur, 2021). BUMDES ini bisa menyerap sekitar 22 (dua puluh dua) tenaga kerja bahkan bisa melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya mencapai 600 (enam ratus) kepala keluarga yang menghidupi lebih 1.800 (seribu delapan ratus) anggota keluarga. Para penduduk sekitar pun dapat menjajakan ragam makanan dan minuman ringan produk lokal buatan mereka selain itu mereka juga bisa menjual sovenir-sovenir lokal untuk dijadikan oleh-oleh para wisatawan yang berkunjung kesana. Para wisatawan dapat menikmati ragam sarana tersedia bersama keluarga sambil menikmati panorama alam sekitarnya. Karcis masuknya hanya Rp10.000 (sepuluh ribu)

setiap orang, parkir mobil setiap unit Rp3.000 (tiga ribu), serta tarif parkir sepeda motor Rp3.000 (tiga ribu).

Semangat masyarakat Desa bersama pemerintahan setempatnya, patut mendapat apresiasi sangat positif dari beragam kalangan, komponen serta elemen masyarakat. Lantaran mereka memiliki keinginan berkemajuan meningkatkan perekonomian melalui wujud Desa wisata, dengan beragam produk kreativitas serta inovatifnya. Sehingga setiap seluruh masyarakat juga aparat pemerintahan hingga kabupaten pun senantiasa perlu memberi banyak dukungan nyata. Di antaranya bersama mewujudkan 'Sapta Pesona'. Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan. Pada destinasi wisata ini pun segera dilakukan upaya peningkatan kualitas penataan, antara lain penertiban anjungan para pedagang (Redaktur, 2021). Berikut adalah beberapa gambar dari BUMDES yang bertemakan wisata dengan nama As-Syifa:

Gambar 3 BUMDES As-Syifa



Sumber: (Redaktur, 2021).

Desa yang kuat akan menjadikan Negara yang kuat, dilihat dari BUMDES di atas keseriusan masyarakat membangun BUMDESnya sehingga membuat perputaran ekonomi bisa

berjalan secara baik. Dari hal yang terkecil sampai terbesar, dari Desa hingga negara, maka Desa yang mandiri akan menjadi tonggak untuk negara yang kuat. Kedaulatan Desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan Desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada didalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, Desa memelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan keseimbangan alam dapat terlestarikan, sementara orientasi kesejahteraan rakyat tercapai secara berjangka panjang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa dapat dinyatakan kesimpulannya sebagai berikut: Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) berbasis teknologi di Desa-Desa yang ada di Kabupaten Garut terlihat masih dalam tahap perkembangan dapat dilihat dari omset pendapatan pertahun BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di sebagian besar Desa yang dapat dikatakan belum memenuhi standar atau pendapatannya masih belum maksimal. Selain itu hanya beberapa BUMDES saja yang keberadaannya eksis dan masih ada pula Desa yang bahkan belum memiliki BUMDES. Beberapa faktor penyebab semua ini diantara lain adalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan kesadaran dari masyarakat Desa untuk memaksimalkan potensi yang ada di Desa.

Faktor pendukung dan penghambat Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) berbasis teknologi di Kabupaten Garut : a). Faktor pendukung, Masyarakat luas mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini dikarenakan kemajuan teknologi yang ada sehingga masyarakat secara tidak sadar pun mengikuti perkembangan yang ada sendirinya dengan begitu BUMDES berbasis teknologi pun akan mudah diikuti oleh masyarakat secara luas. b). Faktor penghambat, Kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi yang berada di Desa untuk dikembangkan sebagai BUMDES selain itu juga kurang maksimalnya pemanfaatan dana Desa yang ada baik DD (Dana Desa) maupun ADD (Alokasi Dana Desa). Upaya mengatasi hambatan untuk meningkatkan terbentuknya BUMDES baru dan berkembangnya BUMDES yang sudah ada dengan berbasis teknologi adalah diadakannya penyuluhan bagaimana penerapan BUMDES tersebut dan pengelolaaanya sehingga menimbulkan minat dari warga. Selain itu dilakukan transparansi dalam pengelolaan uang Desa supaya anggaran yang telah ditujukan untuk kegiatan BUMDES bisa secara utuh didapatkan. Dari hasil tulisan ini didapatkan saran bahwa sudah seharusnya melakukan penyuluhan kepada Desa-Desa yang belum memiliki BUMDES dengan memberikan contoh dari Desa yang BUMDESnya sudah terbilang sukses sehingga menambah minat warga untuk berantusias dalam gotong royong pembentukan BUMDES Desanya.

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami haturkan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas dukungannya.

6. Daftar Pustaka

Simangunsong, F. R. (2016). Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 67-84.

Simangunsong, F. W. (2017). Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at PasirPutih Village, South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences*, 250-268.

Statistik, B. P. (2018). BPS. Diambil kembali dari <https://garutkab.bps.go.id>:
<https://garutkab.bps.go.id/statictable/2019/09/22/398/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-garut-2018.html>

Barat, D. P. (2019, Februari 10). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Diambil kembali dari <https://www.facebook.com/dpmdesajabar/posts/berikut-profil-bumdes-kabupaten-garut-tasikmalaya-majalengka-bogor-bandung-dan-k/1529477290518180/>

Supriadin, J. (2018, Agustus 30). Berkah Bumdes, Warga Desa Garut Kini Bisa Jualan Langsung ke Pembeli. Garut, Jawa Barat, Indonesia.

Redaksi, T. (2019, Oktober 29). Diduga Merugikan Warga, Polda Jabar Periksa Pengurus BUMDes Bersama Kecamatan Karangpawitan Garut. Garut, Jawa Barat, Indonesia.

Garut, B. (2020, Januari 21). <http://garutkab.go.id/page/apbd>. Diambil kembali dari

<http://garutkab.go.id/page/apbd>:
<http://garutkab.go.id/page/apbd>

Garur, B. K. (t.thn.). BPS. Diambil kembali dari <https://garutkab.bps.go.id/statictable/20201718/04/13/342/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-garut-2017.html>:

<https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018/04/13/342/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-garut-2017.html>

Garur, B. K. (2017). BPS. Diambil kembali dari <https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018/04/13/342/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-garut-2017.html>:

<https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018/04/13/342/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-garut-2017.html>

Garur, B. K. (2017). BPS. Diambil kembali dari <https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018/04/13/344/jumlah-pns-di-lingkungan-pemda-garut-menurut-jenis-pendidikan-tahun-2017.html>:

<https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018/04/13/344/jumlah-pns-di-lingkungan-pemda-garut-menurut-jenis-pendidikan-tahun-2017.html>

Jurnal administrasi Pemerintahan Desa, V3.i1.Maret 2022
DOI:10.32669/village
ISSN 2442-2576 (online)
<http://village.id/index.php/village>

Hayati, R. (2019, Agustus 12). Penelitianilmiah.com. Diambil kembali dari <https://penelitianilmiah.com/penelitian-evaluasi/>: <https://penelitianilmiah.com/penelitian-evaluasi/>

Simangunsong, F. (2016). Analisis Potensi Wilayah Desa Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (Studi Kasus

Desa Perbatasan di Kota Banjar). Prosiding Seminar Lokakarya Nasional Indonesian Association for public administration, (hal. 1 -11). Sumatera Utara.

Simangunsong, F. H. (2021). Building the Independence of Villages in Bandung Regency , Indonesia. Repositori, 1 - 11.

Redaktur, T. (2021, Mei 24). Bumdes As-Syifa Tingkatkan Kualitas Destinasi Wisata. Garut, Jawa Barat, Indonesia. (t.thn.).